



RESPON MUI TERKAIT SERTIFIKAT HALAL WINE CS

MUI tak Tanggung Jawab Sertifikasi BPJPH

Jakarta, MIMBAR - Beredarnya video dari masyarakat terkait produk pangan dengan nama tuyul, tuak, beer, serta wine yang mendapat sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Padahal, menurut standar fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), hal itu tidak dibenarkan.

Berkaitan dengan itu, MUI melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan pengecekan. Melalui rilis yang diterima detikHikmah, MUI telah melakukan investigasi dan menggelar pertemuan untuk mencari titik terang atas kasus tersebut.

Hasilnya, informasi tersebut benar adanya dan produk-produk yang disebutkan memperoleh Sertifikat Halal melalui jalur Self Declare tanpa audit Lembaga Pemeriksa Halal serta penetapan kehalalan melalui

Komisi Fatwa MUI. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh saat dihubungi detikHikmah pada Selasa (1/10).

Dalam pertemuan yang dilakukan pada Senin (30/9) sore lalu, Prof Niam mengatakan bahwa penetapan itu menyalahi Standar Fatwa MUI.

"Penetapan Halal tersebut menyalahi Standar Fatwa MUI, juga tidak melalui Komisi Fatwa MUI.

■ Bersambung ke Hal 11



Sementara penerbitan Sertifikat Halal terhadap produk-produk tersebut, tidak melalui MUI dan menyalahi fatwa MUI tentang standar halal."



PROF ASRORUN NIAM SHOLEH
Ketua MUI Bidang Fatwa

LPPOM Klarifikasi Wine Bersertifikat Halal

Jakarta, MIMBAR - Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) memberikan klarifikasi soal produk dengan nama tuyul, tuak, beer, hingga wine bersertifikat halal yang belakangan ramai di media sosial. Hal ini menyusul klarifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI yang menyebut ada 32 nama

produk beer dan wine halal yang berasal dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM.

"Perlu kami sampaikan juga untuk produk-produk dengan nama menggunakan kedua kata tersebut yang ditetapkan halalannya dari Komisi Fatwa MUI adalah produk yang telah melalui pemeriksaan dan/atau pengujian oleh LPH, dengan jumlah terbanyak berasal dari LPH LPPOM sebanyak

32 produk. Selebihnya berasal dari lembaga yang lain," kata Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin dalam keterangannya, dilansir dari Detikcom, kemarin (3/10/2024).

Menanggapi hal ini, LPPOM pun menyampaikan klarifikasi. Dalam rilis resmi LPPOM yang diterima,

■ Bersambung ke Hal 11

Berdasarkan Sistem Informasi Halal (SIHALAL) diterbitkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag), produk minuman dengan merek Nabidz yang telah mendapatkan sertifikat halal merupakan jus buah merek Nabidz. Minuman berakohol itu mendapatkan sertifikat halal lantaran pada saat mendaftarkan ke BPJH merupakan jus buah merek Nabidz.

Kejagung Geledah Kementerian LHK

Jakarta, MIMBAR - Penyidik Jaksa Agung Muda Penindakan Khusus (Jampidsus) menggeledah kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Kamis (3/10).

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat

30 RABIUL AWAL 1446 H

Subuh : 04:58 WIB	Maghrib : 18:19 WIB
Zuhur : 12:18 WIB	Isya : 19:28 WIB
Ashar : 15:28 WIB	

■ Untuk kota Medan sekitarnya

SOAL PELUANG MASUK KABINET PRABOWO

PDIP Tunggu Titah Megawati



Jakarta, MIMBAR - Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengatakan bahwa semua kader menunggu instruksi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal peluang partai itu masuk kabinet pemerintahan presiden terpilih untuk periode

2024-2029, Prabowo Subianto.

Said mengatakan hingga saat ini belum ada pembicaraan di internal partai soal itu. Termasuk beberapa nama kader dan orang dekat PDIP yang belakangan disebut kuat akan bergabung seperti Azwar Anas hingga Budi Gunawan.

"Baik Pak BG [Budi Gunawan], baik Pak Olly [Olly Dondokambey], Pak Anas [Azwar Anas] tidak ada pembicaraan di internal partai. Dan, tidak ada instruksi dari Ibu Ketum. Kita semua tegak lurus menunggu apapun titah yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum."

■ Bersambung ke Hal 11

LUAR NEGERI

25 WNI Dievakuasi dari Lebanon

Jakarta, MIMBAR - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menyebut sekitar 25 warga negara Indonesia (WNI) sudah dievakuasi dari Lebanon. Evakuasi tersebut dilakukan melalui jalur darat, yakni lewat Suriah.

■ Bersambung ke Hal 11



- Asal comot aja ...
- Ada apa ini ...?

Hidayah

BPJH Kebablasan

Oleh Dr A Rasyid, MA (Dosen FIS UINSU)

MEMILIH produk halal merupakan bagian dari identitas Muslim dan mencerminkan nilai-nilai moral serta etika yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Islam. Halal berkaitan langsung dengan ajaran Alqur'an dan Hadis yang mengatur tentang makanan dan minuman yang diperbolehkan. Ini merupakan bagian penting dari praktik

keagamaan.

■ Bersambung ke Hal 11

Kisah Tangis Putri Bung Karno Dikhianati "si Tukang Kayu"

CAGUBSU Edy Rahmayadi (63) menceritakan momen dirinya dipinang PDIP maju di Pilgubsu 2024.

Mantan Pangkostrad itu sempat makan bersama Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri (77), putri proklamator Bung Karno. Dalam pertemuan itu, para petinggi PDIP sempat menyampaikan kekecewaan Mega lantaran dikhianati seorang tukang kayu.

Bahkan putri Bung Karno itu sampai menangis akibat pengkhianatan tersebut.

Cerita bermula ketika Edy dipanggil

Sekjen Hasto Kristiyanto ke Jakarta. Saat itu PDIP menawari Edy maju sebagai cagubsu.

"Saya dipanggil Pak Hasto. Rupanya perintah ibu (Megawati). Ditanya, 'bang Gub mau jadi gubernur?'" ucap Edy menirukan pembicaraannya dengan para petinggi PDIP, di hadapan para pendukungnya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Selasa (1/10).

■ Bersambung ke Hal 11



Terjerat Kasus Pengadaan APD, KPK Tahan 2 Tersangka

Jakarta, MIMBAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemkes) dengan sumber dana dari Dana Siap Pakai (DSP) BNPB tahun 2020. Mereka ialah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan Kemkes Budi Sylvana dan Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI) Satrio Wibowo. Penahanan dilakukan setelah KPK merampungkan pemeriksaan terhadap Budi dan Satrio.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada tersangka BS di Rutan Cabang KPK Gedung ACLC dan tersangka SW di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 3 sampai dengan Oktober 2024," ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (3/10).

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan satu tersangka lain atas nama Ahmad Taufik selaku Direktur Utama PT Permana Putra

Mandiri (PPM). Namun, yang bersangkutan masih dalam tahap pemulihan sehingga belum dilakukan penahanan.

KONSTRUKSI KASUS

Pada Maret 2020, Shin Dong Keun selaku Direktur Utama PT Yonsin Jaya (YS), perusahaan yang mewakili para produsen APD, menunjuk PT PPM sebagai distributor resmi APD selama dua tahun.

PT GA Indonesia (GAI) selaku produsen APD juga menunjuk PT PPM sebagai distribu-

tor resmi APD selama dua tahun.

Pada 20 Maret 2020, Kemkes melalui Pusat Krisis Kesehatan pada awal Covid-19 membeli APD sebanyak 10.000 pcs dari PT PPM dengan harga Rp379.500/set. Satu hari berikutnya, TNI atas perintah Kepala BNPB saat itu mengambil APD dari produsen APD milik PT PPM di Kawasan Berikat, dan langsung mendistribusikan ke 10 provinsi dengan tidak dilengkapi dokumentasi, bukti pendukung dan surat pemesanan.

Pada 22 Maret 2020, Shin Dong Keun dan

Satrio selaku Dirut PT EKI menandatangani kontrak kesepakatan sebagai authorized seller APD sebanyak 500.000 set dengan nilai tergantung nilai tukar dolar saat pemesanan.

Selanjutnya, 23 Maret 2020, PT PPM dan PT EKI menandatangani kontrak kerja sama distribusi APD dengan margin 18,5 persen diberikan kepada PT PPM. Selang satu hari, dalam rapat, Harmensyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BNPB melakukan negosiasi harga APD dengan Satrio agar diturunkan dari harga US\$60 menjadi US\$50. ***

PDIP Tunggu...

Dari Halaman 1

kata Said di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (3/10).

Di sisi lain, dia menyebut PDIP menghormati hak prerogatif presiden terkait penentuan komposisi kabinet ke depan. Said mengaku pihaknya tak mau ikut campur pada ranah yang bukan menjadi wewenang.

Said justru memastikan pihaknya akan mendukung apapun keputusan Presiden soal kabinet. Termasuk peluang menambah jumlah menteri.

"Kami no comment

karena itu hak prerogatif Presiden. Monggo mana yang terbaik bagi presiden karena dari sisi APBN sudah kami siapkan anggarannya," katanya.

Sementara, itu Ketua DPR sekaligus putri bungsu Megawati, Puan Maharani irit bicara saat ditanya soal peluang partainya masuk kabinet pemerintahan ke depan. Dia mengaku tak tahu menahu soal kabar tersebut.

"Kurang tahu, kurang tahu, saya enggak tahu," ucap Puan yang juga Ketua DPP PDIP itu. (cnni/js)

Kisah Tangis...

Dari Halaman 1

Mendapat pertanyaan itu, Edy pun bingung. Ternyata PDIP berkomitmen memberikan dukungan penuh kepadanya. Setelah itu, Edy pun bertemu langsung dengan Megawati.

"(Saya bilang) Tidak ada partai saya. 'PDI Perjuangan siap untuk usung Mas Gub'. Saya pun mikir di situ. Siap dengan dinamika, pasti. Akhirnya saya diundang makan dengan ibu," urainya.

Di meja makan, Mega curhat tak ingin negara ini diobok-obok. Setelah makan bersama Mega, Edy pun sempat dicegat para petinggi PDIP. Mereka mengingatkan Edy agar tak membuat Megawati menangis (lagi). "Saya tak mau bangsa ini diobok-obok begitu kata si ibu. Keluar, ditahan saya sama petinggi-tinggi partai (partai), 'jangan bikin ibu itu nangis dua kali,'" ujar Edy. Kata Edy, Megawati sempat menangis karena dikhianati oleh 'Tukang Kayu'.

Setelah itu, Edy pun semakin bertekad maju di Pilgubsu. Ia tak gentar mel-

wan Bobby Nasution yang merupakan menantu Presiden Jokowi --penguasha mebel di Solo sebelum terjun ke dunia politik bersama partai banteng.

"Makin bingung saya. Nangis yang pertama dikhianati oleh tukang kayu itu, di sini banyak tukang kayu."

"Kalau saya tak persoalan ada media (bertanya) 'Bagaimana lawan bapak anaknya presiden?' Akhirnya malaikat pun jadi. Tak ada urusan sama saya itu," ujarnya.

Edy pun lantas mengingatkan kembali bahwa yang 'membesarkan' Mulyono adalah PDIP. Mulyono merupakan nama kecil dari Presiden Jokowi.

"Kalian sudah pasti tahu yang membesarkan Mulyono ini siapa? PDI Perjuangan, itu intinya," tegasnya.

Hanya putra campuran berdarah Melayu (ayah) dan Jawa (ibu) itu tidak sempat dikutip media menuliskan peribahasa yang dinukil dari laman google: "Kacang lupa kulitnya," melukiskan orang sombong yang lupa pada asal usulnya, atau menggambarkan orang yang tak tahu diri. (cnni/cp)

masyarakat untuk menjelaskan dasar keputusan tersebut dan mendengarkan masukan serta kekhawatiran umat.

Memberikan penjelasan yang jelas mengenai kriteria kehalalan, termasuk bagaimana produk yang mengandung alkohol dapat mendapatkan sertifikat halal.

Kemudian BPJH harus mengkaji kembali kebijakan sertifikasi halal untuk produk yang kontroversial dan mempertimbangkan pandangan serta sensitivitas umat Islam. BPJH harus meningkatkan transparansi dalam proses sertifikasi halal agar masyarakat memahami kriteria yang digunakan. Bekerja sama dengan lembaga keagamaan untuk memastikan keselarasan antara praktik sertifikasi dan prinsip-prinsip agama. Langkah-langkah ini dapat membantu meredakan keresahan dan membangun kepercayaan di antara masyarakat.

Banyaknya pihak meminta pembubaran BPJPH menunjukkan tingkat ketidakpuasan yang tinggi di kalangan umat Islam terkait keputusan sertifikasi halal, seperti yang terjadi dengan wine. Jika situasi ini berlanjut, BPJPH perlu membangun komunikasi terbuka dengan umat Islam untuk memahami dan merespons kekhawatiran mereka. ***



Hidayah

BPJH Kebablasan

Dari Halaman 1

Sertifikat halal sangat penting bagi kaum Muslim karena jaminan kehalalan, Kepatuhan Agama, Perlindungan Kesehatan, dan sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk, baik di pasar lokal maupun internasional. Karena itu pemberian sertifikat halal tidak boleh sembarangan.

Sertifikat halal untuk wine yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tentu menjadi kontroversial dankebablasan, karena wine secara tradisional terbuat dari anggur yang difermentasi, mengandung alkohol, dan dianggap haram dalam Islam. Langkah ini bisa dilihat sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan pasar atau pelaku industri, tetapi juga menimbulkan kebingungan di kalangan umat Muslim mengenai kehalalan produk tersebut.

Banyak yang berpendapat bahwa meskipun suatu produk mendapatkan sertifikasi halal, substansi dan prinsip dasar dari kehalalan harus tetap diperhatikan. Penting untuk memahami konteks dan dampak dari keputusan ini dalam masyarakat.

BPJPH sebaiknya mempertimbangkan langkah-langkah berikut yakni mengadakan forum diskusi dengan pemuka agama dan

Dari Halaman 1

"Setelah kami lakukan pengecekan benar penyidik pada Jampidsud sedang melakukan kegiatan penegakan hukum berupa pengeledahan di KLHK," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaaan Agung Harli Siregar

Dari Halaman 1

"Jadi, yang dievakuasi kali ini adalah melalui (jalur) darat. Tadi pagi, saya sudah mendapatkan laporan bahwa mereka sudah sampai melalui Suriah, melalui Damaskus, dengan selamat untuk kemudian akan kembali ke Indonesia. Totalnya (ada sekitar) 20 sampai 25 (orang)," kata Retno di Puri Agung, Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada Kamis (3/10).

Retno tidak menyebutkan kapan para WNI di Lebanon yang telah dievakuasi akan sampai ke Indonesia. Sebab, menurutnya, situasi di lapangan masih sangat dinamis.

Namun, Retno berharap seluruh WNI yang telah dievakuasi bisa segera tiba di Indonesia. Ia juga akan terus memantau situasi di Lebanon, terutama mengenai kabar WNI yang sudah

Dari Halaman 1

Karena itu MUI tidak bertanggung jawab atas klaim kehalalan terhadap produk-produk tersebut," ujarnya dalam rapat klarifikasi dan tabayan yang juga dihadiri pimpinan Komisi Fatwa MUI serta unsur masyarakat pemerhati dan pegiat halal nasional yang melaporkan kasus tersebut ke MUI.

CARI JALAN KELUAR

Prof Niam menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan BPJPH untuk mencari jalan keluar terbaik agar kasus serupa tidak terulang.

"Saya akan segera komunikasi dengan teman-teman Kemenag, khususnya BPJPH untuk mendiskusikan masalah ini," tegasnya.

Melalui rapat tersebut diperoleh informasi bahwa kejadian tersebut benar adanya karena bukti-bukti jelas terpampang dalam website BPJPH dan diarsipkan oleh pelapor. Meski demikian, belakangan nama-nama produk tersebut tidak muncul lagi di aplikasi BPJPH.

Guru Besar Ilmu Fikih tersebut juga mengatakan, sesuai dengan ketentuan dalam sertifikasi halal, penetapan kehalalan produk harus mengacu pada standar halal yang ditetapkan oleh MUI.

"Sementara penerbitan Sertifikat Halal terhadap produk-produk tersebut, tidak melalui MUI dan menyalahi fatwa MUI tentang standar halal," tambah Prof Niam.

Dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Halal, setidaknya ada empat kriteria penggunaan nama dan bahan. Di antaranya tidak boleh menggunakan nama dan/atau simbol makanan dan/atau minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.

"Sesuai dengan pedoman dan standar halal, MUI tidak bisa menetapkan kehalalan produk dengan nama yang terasosiasi dengan produk haram, termasuk dalam hal rasa, aroma, hingga kemasan. Apalagi produk dengan nama yang dikenal secara umum sebagai jenis minuman yang dapat memabukkan," beber Prof Niam.

Kemudian, turut dijelaskan pada ketentuan Fatwa MUI Nomor 44 tahun 2020 tentang penggunaan nama, bentuk dan kemasan produk yang tidak dapat disertifikasi halal, produk

Dari Halaman 1

LPPOM menyebut 25 produk dengan kata kunci "wine" adalah produk non-pangan.

"Database LPPOM menunjukkan adanya 25 nama produk dengan kata kunci 'wine'. Semuanya berupa produk kosmetik di mana penggunaan kata 'wine' berasosiasi dengan warna (bukan sensori rasa maupun aroma)," kata LPPOM dalam keterangannya.

Menurut Komisi Fatwa MUI, penggunaan kata "wine" yang menunjukkan jenis warna "wine" untuk produk non-pangan diperbolehkan.

Kedua, LPPOM menemukan produk dengan nama "bir" hanya diperuntukkan bagi produk minuman tradisional yang bukan merupakan khamr yaitu bir plotok. Hal ini pun diperbolehkan oleh Komisi Fatwa MUI dengan pertimbangan bahwa produk tersebut adalah produk yang sudah dikenal lama di tengah masyarakat sebagai produk minuman tradisional non-khamr.

LPPOM juga melakukan penelusuran lebih lanjut terkait tiga produk dengan nama "beer" yang melakukan pemeriksaan melalui LPH LPPOM. Ketiganya adalah Beer Strudel, Beer Stroganoff, dan Ginger Beer.

Berikut klarifikasi lengkap LPPOM soal

Kejagung Geledah...

Dari Halaman 1

kepada wartawan.

Lanjut Harli, pengeledahan terkait dengan tata kelola perkebunan kelapa sawit. "Terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit tahun 2016-2024," kata Harli.

Harli enggan membeberkan barang bukti apa

25 WNI...

dievakuasi. "Nanti kita lihat karena, 'kan, ruang udara di beberapa negara di wilayah tersebut mengalami buka tutup. Jadi, kita akan lihat. Pokoknya kesempatan terakhir penerbangan dapat dilakukan tentunya akan kita lakukan lebih cepat lebih baik."

"Kita sudah memiliki satu grup para duta besar di Timur Tengah yang setiap waktu beliau-beliau (akan) melaporkan kepada saya (menge-nai) perkembangan di masing-masing negara," tambah Retno.

Lebih lanjut, Retno juga menjelaskan bahwa tidak semua WNI di Lebanon akan dievakuasi. Sebab, ada beberapa WNI di sana yang memilih untuk tetap tinggal di sana bersama keluarganya.

Namun, ia tidak menyebut berapa jumlah pasti WNI yang memilih bertahan di Lebanon. "Kita mengevakuasi. Ada beberapa yang dengan

MUI tak...

halal tidak boleh menggunakan nama dan/atau simbol makanan dan/atau minuman yang mengarah kepada nama benda atau binatang yang diharamkan, termasuk babi dan khamr atau alkohol. Kecuali, produk tersebut termasuk dalam produk tradisi ('urf) dan sudah dipastikan tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti bakso, bakmi, bakpia, bakpao.

Atas dasar itu, Prof Niam menghimbau agar semua pihak yang berperan dalam penetapan kehalalan produk melalui mekanisme self declare harus berhati-hati dan lebih teliti, serta memperhatikan titik-titik kritis dalam proses penetapan halal. Niam juga menegaskan akan berkoordinasi dengan BPJPH agar kasus-kasus serupa tidak terulang.

"MUI akan koordinasi dan konsolidasi dengan BPJPH untuk mencegah kasus serupa terulang. Jangan sampai merusak kepercayaan publik yang bisa berdampak buruk bagi upaya penjaminan produk halal. Masyarakat harus diyakinkan dengan kerja serius kita. Kalau masyarakat sudah tidak percaya, bisa hancur. Jangan sampai hanya mengejar target kuantitatif jadinya yang keluar adalah halal-halal an," jelasnya.

SERTIFIKASI HALAL LEWAT SELF

DECLARE CENDERUNG RAWAN

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda menjelaskan sertifikasi halal melalui Self Declare mengandung kerawanan, karenanya memerlukan kehati-hatian yang ekstra.

"Pihak-pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal, lebih khusus melalui Self Declare harus berhati-hati dan ekstra teliti, serta mematuhi standar halal yang berlaku. Harus benar-benar memastikan bahwa produk tersebut merupakan produk yang sudah jelas kehalalannya dan proses produksi sederhana. Juga harus memperhatikan titik-titik kritis dalam proses halal," katanya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Direktur Halal Corner Aishah Maharani menjelaskan bahwa penetapan halal lewat Self Declare yang tanpa audit dari LPH, seringkali menimbulkan masalah.

"Ini bisa menghancurkan reputasi Indonesia dalam penjaminan produk halal di mata global, gara-gara cara yang tidak profesional. Perlu ada perbaikan. Kalau tidak, metode ini dihapus

LPPOM Klarifikasi...

Dari Halaman 1

temuan tiga produk tersebut.

a. Nama produk Beer Strudel dengan Nomor SH BPJPH ID3211000651650922 diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan Pelaku Usaha "Meylia Kharisma Puspita." Berdasarkan Ketetapan Halal MUI Provinsi Jawa Barat No. LPPOM-01201281591022.

-Ketetapan Halal (KH) yang diunggah ke Sihalal menunjukkan tidak ada nama Beer Strudel, hanya ada nama Beef Strudel.

-Secara paralel dilakukan pengajuan permohonan perubahan nama dalam SH BPJPH sesuai dengan KH berlaku, yakni dari Beer Strudel diubah menjadi Beef Strudel.

b. Beer Stroganoff, SH BPJPH No. ID34220000185660321 diterbitkan pada tanggal 26 April 2022 dengan Pelaku Usaha "Salsa Catering" berdasarkan Ketetapan Halal MUI DI Yogyakarta No. 12340002010421.

-Ketetapan Halal (KH) yang diunggah ke Sihalal menunjukkan tidak ada nama Beer Stroganoff, hanya ada nama Beef Stroganoff.

-Secara paralel dilakukan pengajuan permohonan perubahan nama sesuai dengan KH berlaku, yakni dari Beer Stroganoff dengan nama Beef Stroganoff.

c. Ginger Beer, SH BPJPH No. ID52320000072060221 diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2021 dengan Pelaku Usaha "PT

saja yang dibawa penyidik, sebab pengeledahan masih berlangsung. Mengenai hasilnya belum dapat kami sampaikan," kata Harli.

Sementara itu, pihak Kementerian LHK yang coba dihubungi wartawan terkait pengeledahan tersebut, hingga berita ini diturunkan, belum merespon. (rm/js)

pertimbangan keluarga dan sebagainya, mereka memilih untuk tetap tinggal di sana (Lebanon). (Namun), saya tidak hafal jumlahnya berapa," kata Retno.

Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), Rolliansyah (Roy) Soemirat, juga mengkonfirmasi kabar mengenai evakuasi WNI dari Lebanon.

Ia mengatakan, bahwa evakuasi WNI dari negara tersebut saat ini sedang berjalan. "Terkait hal ini, proses evakuasi WNI dari Lebanon juga sedang berlangsung," kata Roy dalam keterangannya pada Selasa (2/10).

Roy juga mengatakan seluruh kedutaan Besar RI (KBRI) di Timur Tengah saat ini terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh WNI di wilayahnya masing-masing. (cnni/js)

Dari Halaman 1

saja," terangnya. Dalam penuturannya, Aishah menyebut bahwa pada metode Self Declare diperlukan manual SJPH bukan sekedar narasi pernyataan dari PU.

"Namun jika tidak bisa, metode self declare sebaiknya dihapus saja, karena sudah nyata mudaratnya. Ini juga tidak sejalan dengan spirit penjaminan yang diaduhului dengan audit. Sebagai gantinya, dibuatkan sistem sertifikasi halal gratis dengan metode reguler dengan memberdayakan P3H sebagai pendamping usaha mikro sebelum pendafatnatan sertifikasi halal, audit halal tetap dilakukan oleh auditor halal, bukan P3H," urainya.

PRODUK YANG TIDAK DAPAT

DISERTIFIKASI HALAL

Berikut beberapa produk yang tidak dapat disertifikasi halal sebagaimana tertuang dalam Fatwa MUI No.44 Tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal. Fatwa ini telah didatangi Hasanudin Abdul Fattah serta Asrorun Niam Sholeh sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI.

a. Produk yang menggunakan nama dan/atau simbol-simbol kekufuran, kemaksiatan, dan/atau berkonotasi negatif;

b. Produk yang menggunakan nama benda/hewan yang diharamkan, kecuali:

1) yang telah mentradisi ('urf) yang dipastikan tidak mengandung bahan yang diharamkan;

2) yang menurut pandangan umum tidak ada kekhawatiran adanya penafsiran kebolehan mengkonsumsi hewan yang diharamkan tersebut;

3) yang mempunyai makna lain yang relevan dan secara empirik telah digunakan secara umum.

c. Produk yang berbentuk babi dan anjing dengan berbagai desainnya;

d. Produk yang menggunakan kemasan bergambar babi dan anjing sebagai fokus utama;

e. Produk yang memiliki rasa/aroma (flavour) unsur benda atau hewan yang diharamkan;

f. Produk yang menggunakan kemasan yang berbentuk dan/atau bergambar erotis dan porno. (det/js)

Metro Lombok Asri (Hotel Santika Mataram)" Berdasarkan Ketetapan Halal MUI Provinsi NTB No. B-45/DP.P-XXVIII/III/2021

-Ketetapan Halal yang diunggah ke Sihalal benar menunjukkan ada nama Ginger Beer.

-Setelah melakukan penelusuran ulang ke Pelaku Usaha, dapat dipastikan bahwa tidak ditemukan adanya bahan haram dalam pembuatan produk tersebut. Produknya pun tidak berasosiasi dengan "beer".

-Perusahaan bersedia untuk mengganti nama menu yakni dari Ginger Beer menjadi Fresh Ginger Breeze. Hal ini dibuktikan dengan surat permohonan perubahan nama yang secara paralel diajukan oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH dan perubahan nama pada KH.

Terakhir, LPPOM turut klarifikasi bahwa proses pemeriksaan halal yang dilakukan LPH LPPOM tidak pernah meloloskan produk dengan nama tuyl dan tuak. Pihaknya berkomitmen untuk melakukan perbaikan layanan untuk menghasilkan produk halal yang terjamin dan terpercaya.

"Kami harap seluruh pihak yang terlibat tidak menyebarkan isu yang belum jelas. LPPOM menerima segala bentuk saran dan masukan untuk kemajuan layanan sertifikasi halal Indonesia ke depan," pungkas LPPOM. (det/js)